



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0151/Pdt.P/2017/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh: ----

xxxxxx, umur 58 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dukuh Pedawang Timur RT 001 RW 002 Desa Pedawang Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, Calon Isteri anak Pemohon dan calon besan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonan tertanggal 24 Mei 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen, dengan register Nomor 0151/Pdt.P/2017/PA.Kjn, telah mengemukakan alasan / dalil-dalil sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan xxxxx pada tanggal 8 September 1980 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 157/13/IX/1980 tanggal 8 September 1980 ;-----
2. Bahwa pernikahan Pemohon dengan xxxxx tersebut telah mempunyai anak yang bernama xxxxx ; -----
3. Bahwa anak Pemohon bernama xxxxx tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan yang bernama xxxxx umur 15 tahun 4

Penetapan Nomor 0151/Pdt.P/2017/PA.Kjn.
Hal. 1 dari 10 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, agama Islam, pendidikan SMP pekerjaan Buruh Harian Lepas alamat Desa Legokkalong Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan;-----

4. Bahwa hubungan anak Pemohon bernama xxxxxx dengan xxxxxx tersebut sudah sangat akrab dan sulit dipisahkan bahkan anak Pemohon telah menghamilinya dengan usia kehamilannya 4 bulan akibat hubungan kelamin dengan calon istrinya (xxxxxx) sehingga apabila tidak segera dinikahkan, Pemohon khawatir akan menimbulkan madlarat yang lebih besar; -----
5. Bahwa antara anak Pemohon nama xxxxxx dengan calon istrinya (xxxxxx) tidak ada hubungan keluarga/nasab maupun sesusuan yang menyebabkan halangan untuk nikah; -----
6. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi suami dan atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Buruh Jahit dengan penghasilan tetap setiap minggunya kurang lebih sejumlah Rp. 250.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) ;-----
7. Bahwa Pemohon dan xxxxxx sudah datang ke rumah keluarga xxxxxx untuk melamar xxxxxx, dan xxxxxx dan keluarganya telah menerima lamaran dari xxxxxx ;-----
8. Bahwa untuk mengatasi hal-hal tersebut di atas, Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan dengan maksud untuk menyatakan kehendak menikah anak Pemohon bernama xxxxxx dengan xxxxxx namun oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur (masih berumur 16 tahun 2 bulan) karena lahir pada tanggal 30 Maret 2001 sebagaimana tersebut dalam surat penolakan Nomor: 283/Kua.11.26.01/PW.01/05/2017 tanggal 18 Mei 2017 ;-----

Berdasarkan alasan-alasan/ dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajeen berkenan menerima permohonan ini dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama xxxxxx untuk menikah dengan seorang perempuan bernama xxxxxx ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Penetapan Nomor 0151/Pdt.P/2017/PA.Kjn.
Hal. 2 dari 10 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir menghadap di persidangan;-----

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar menunda rencana untuk menikahkan anaknya hingga anak Pemohon memenuhi persyaratan untuk menikah, akan tetapi tidak berhasil, maka dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -----

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya;-----

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon besan dan calon menantu Pemohon yang telah dicatat selengkapny dalam berita acara persidangan;-----

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxx, Nomor: 3326071307590001, tanggal 24 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Propinsi Jawa Tengah Kabupaten Pekalongan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya ditandai dengan P.1;-----
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 157/13/IX/1980 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, tanggal 08 September 1980, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Kajen, selanjutnya ditandai dengan P.2;-----
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxx, Nomor : AL.669.0202803, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, tanggal 19 Nopember 2010, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan P.3;-----

Penetapan Nomor 0151/Pdt.P/2017/PA.Kjn.
Hal. 3 dari 10 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan Nomor : 282/KUA.11.26.06/PW.01/05/2017, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, tanggal 18 Mei 2017, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan P.4;-----
5. Foto copy Surat Penolakan Pernikahan Nomor : 283/KUA.11.26.01/PW.01/05/2017, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, tanggal 18 Mei 2017, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan P.5.-----

Bahwa, disamping itu, pihak Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. **xxxxxx**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
 - Bahwa saksi kenal Pemohon;-----
 - Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Kantor Pengadilan Agama Kajeen karena hendak menikahkan anak Pemohon yang ditolak oleh KUA Kecamatan Karanganyar dengan alasan anaknya belum cukup umur;-----
 - Bahwa anak Pemohon bernama **xxxxxx** hendak menikah dengan seorang perempuan bernama **xxxxxx**;-----
 - Bahwa anak Pemohon berusia 16 tahun 2 bulan;-----
 - Bahwa mereka berstatus sebagai peraja dan perawan;-----
 - Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon isterinya sudah sangat dekat karena sudah lama kenal dan berpacaran;-----
 - Bahwa setahu saksi baik calon suami maupun calon istri semuanya sudah bekerja sebagai Penjahit;-----
 - Bahwa anak Pemohon (**xxxxxx**) sudah meminang calon isterinya (**xxxxxx**);-----
 - Bahwa antara **xxxxxx** dengan **xxxxxx** tidak ada hubungan darah atau nasab;-----
 - Bahwa saksi sudah menasehati untuk menunda pernikahan namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup untuk menasehatinya lagi;-----

Penetapan Nomor 0151/Pdt.P/2017/PA.Kjn.
Hal. 4 dari 10 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masyarakat sekitar tidak masalah dengan perkawinan ini, bahkan menghendaki secepatnya dilaksanakan pernikahan ini akan lebih baik;---
- 2. **xxxxxx**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
 - Bahwa saksi kenal Pemohon;-----
 - Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Kantor Pengadilan Agama Kajen karena hendak menikahkan anak Pemohon yang ditolak oleh KUA Kecamatan Karanganyar dengan alasan anaknya belum cukup umur;-----
 - Bahwa anak Pemohon bernama **xxxxxx** hendak menikah dengan seorang perempuan bernama **xxxxxx**;-----
 - Bahwa **xxxxxx** sudah meminang **xxxxxx**;-----
 - Bahwa antara **xxxxxx** dengan **xxxxxx** tidak ada hubungan darah atau nasab;-----
 - Bahwa antara **xxxxxx** dengan **xxxxxx** tidak ada hubungan sepersusuan;-----
 - Bahwa antara **xxxxxx** dengan **xxxxxx** tidak ada hubungan semenda;-----
 - Bahwa **xxxxxx** tidak dalam pinangan orang lain selain **xxxxxx**;-----

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon penetapan; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kedalam semua peristiwa yang terdapat dalam berita acara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1), terbukti Pemohon adalah penduduk/bertempat tinggal di Dukuh Pedawang Timur RT 001 RW 002 Desa Pedawang Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan, maka sesuai

Penetapan Nomor 0151/Pdt.P/2017/PA.Kjn.
Hal. 5 dari 10 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Kajen, oleh karenanya permohonan Pemohon aquo formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, secara kompetensi absolut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan padangan tentang hak dan kewajiban suami istri, kepada Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai Pemohon mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian voluntair (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon serta mendengar keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama kepada anak Pemohon (xxxxxx xxxxxx) untuk dapat menikah dengan seorang perempuan bernama xxxxxx dengan dalil dan alasan bahwa anak Pemohon sudah memining, dan hubungan mereka sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam, tetapi usia anak Pemohon (xxxxxx) belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh undang-undang yakni belum berusia 19 (sembilan belas tahun), sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan menolak untuk menikahkan keduanya dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor : 283/KUA.11.26.01/PW.01/05/2017, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, tanggal 18 Mei 2017 (bukti P.5);-----

Penetapan Nomor 0151/Pdt.P/2017/PA.Kjn.
Hal. 6 dari 10 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa Penolakan Kantor Urusan Agama adalah beralasan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan P.4 terbukti bahwa Pemohon berumur **16 tahun 2 bulan**, yakni belum mencapai batas usia perkawinan yang ditentukan undang-undang;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menjelaskan bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya telah menjalin hubungan cinta dan telah bertunangan, terlihat semakin akrab, kemudian pihak keluarga telah membicarakan kelanjutan hubungan akrab tersebut dengan orang tua calon isterinya bahkan telah merencanakan pernikahan, dan tidak ada halangan untuk menikah baik ditinjau dari hubungan kekeluargaan maupun halangan yang lainnya;-----

Menimbang, bahwa kesaksian Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah melihat dan mendengar langsung bahwa kasus posisi anak Pemohon belum mencapai usia yang ditentukan undang-undang untuk melangsungkan perkawinan, tetapi bermaksud akan segera menikah dan telah mendapat persetujuan kedua orang tuanya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dan keterangan para Saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan Saksi yang satu dengan Saksi lainnya, dengan demikian keterangan para Saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan Saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima;-----

Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, kecuali karena yang bersangkutan belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku;-----

Penetapan Nomor 0151/Pdt.P/2017/PA.Kjn.
Hal. 7 dari 10 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa Pemohon telah sepakat untuk menikahkan anak Pemohon, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, tetapi apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang bagi kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama **xxxxxx**;-----

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, sesuai dengan kaidah fiqih yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum : -----

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih Keuntungan"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan Pemohon untuk diberikan dispensasi nikah telah beralasan dan tidak melawan hukum bahkan sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi nikah sudah beralasan dan tidak melawan hukum dan juga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama **xxxxxx**, yang akan dituangkan dalam amar penetapan ini;--

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon; -----

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

Penetapan Nomor 0151/Pdt.P/2017/PA.Kjn.
Hal. 8 dari 10 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada Pemohon (xxxxxx) untuk menikah anak Pemohon bernama (xxxxxx xxxxxx) dengan seorang perempuan bernama xxxxxx;-----

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1438 Hijriah oleh **Dra. Hj. Z. Hani'ah** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. Saefudin, M.H** dan **Drs. Imam Maqduruddin Alsy** masing-masing sebagai hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Moch. Kustanto, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;-----

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Z. Hani'ah

Hakim Anggota

ttd

Drs. Saefudin, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Imam Maqduruddin Alsy

Penetapan Nomor 0151/Pdt.P/2017/PA.Kjn.
Hal. 9 dari 10 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

Moch. Kustanto, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran :	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses :	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan :	Rp. 90.000,-
4. Biaya redaksi :	Rp. 5.000,-
5. Materai :	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 181.000,-

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Pengadilan Agama Kajen

Panitera

Drs. H. Mashuri

Penetapan Nomor 0151/Pdt.P/2017/PA.Kjn.
Hal. 10 dari 10 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)